



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AMBON
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AMBON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TUMPAL NAPITUPULU**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **16349**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **981.688.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/100 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/84 m2 di BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 338.688.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/38 m2 di KEPULAUAN RIAU, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **231.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **----**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.212.688.000**

III. HUTANG Rp. **241.600.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **971.088.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **19 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.